

## MENDAG TINJAU KETERSEDIAAN BERAS DI JAKARTA

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kedua kiri) bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kiri), Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi (kedua kanan) dan Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan Februnto (kanan) memberikan keterangan pers usai meninjau Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) di Jatinegara, Jakarta, Senin (7/11). Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau ketersediaan beras dan stabilisasi harga.



FOTO: ANTARA

# Pemerintah Selenggarakan Konsultasi Publik RUU P2SK Terkait KSP-USP

“Pemerintah sependapat dengan DPR RI yang menginisiasi RUU P2SK ini. Pemerintah memiliki semangat yang sama dengan DPR RI bahwa saat ini adalah momentum yang sangat baik untuk melakukan reformasi dari sisi *regulity framework* dari sistem keuangan kita, disamping untuk memastikan bahwa *regulity framework* kita sejalan perkembangan *regulity framework global*,” kata Suminto.

JAKARTA (IM) – Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyelenggarakan Konsultasi Publik mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan & Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penguatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP), pada Senin (7/11) secara virtual.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Asosiasi Profesi, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Forkopi, Perhimpunan Periset Indonesia (PPI), dan Akademi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kementerian Keuangan, Suminto, dalam acara tersebut menyampaikan bahwa RUU P2SK memiliki peran yang sangat penting karena RUU ini akan menjadi momentum reformasi yang luar biasa di sektor keuangan agar kinerja sektor keuangan Indonesia menuju ke arah yang semakin baik, semakin handal dalam melakukan fungsi intermediasi guna mendukung pertumbuhan pembangunan dan pemulihan ekonomi, serta dalam upaya

menopang stabilitas sistem keuangan.

“Pemerintah sependapat dengan DPR RI yang menginisiasi RUU P2SK ini. Pemerintah memiliki semangat yang sama dengan DPR RI bahwa saat ini adalah momentum yang sangat baik untuk melakukan reformasi dari sisi *regulity framework* dari sistem keuangan kita, disamping untuk memastikan bahwa *regulity framework* kita sejalan perkembangan *regulity framework global*,” kata Suminto di laman Kemenkeu, Senin (7/11).

Suminto mengatakan bahwa reformasi sektor keuangan melalui RUU P2SK ini diharapkan dapat menangani beberapa kelemahan dan kekurangan yang masih ada di sektor keuangan Indonesia saat ini.

Beberapa hal tersebut di antaranya masih rendahnya literasi keuangan & ketimpangan akses ke jasa keuangan yang terjangkau, masih tingginya biaya transaksi di sektor keuangan, masih terbatasnya instrumen keuangan baik in-

strumen investasi maupun instrumen pengelolaan risiko, masih rendahnya kepercayaan dan perlindungan investor dan konsumen, serta adanya kebutuhan penguatan kerangka koordinasi dan penanganan stabilitas sistem keuangan.

“Sehingga secara sederhana reformasi melalui RUU P2SK ini kita harapkan mampu *achieving five main objective* yaitu meningkatkan akses ke jasa keuangan, memperluas sumber pembiayaan jangka panjang, meningkatkan daya saing & efisiensi, mengembangkan instrumen dan memperkuat mitigasi risiko, dan meningkatkan perlindungan investor & konsumen. Serta pada saat yang bersamaan terjadi penguatan koordinasi baik dalam pengembangan sektor keuangan Indonesia maupun dalam kerangka penanganan permasalahan perbankan dan stabilitas sistem keuangan Indonesia,” kata Suminto.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU 13 Tahun 2022 mengenai Pembentukan Per-

aturan Perundang-undangan, dalam rangka memastikan tersusunnya dan terselenggaranya Undang-Undang yang baik, diperlukan adanya partisipasi masyarakat/publik.

Masyarakat/publik yang berkepentingan dengan Undang-Undang itu memiliki kesempatan untuk didengar pendapatnya, aspirasinya, ataupun keinginannya. Seluruh masukan yang sudah didengar tersebut, baik itu asosiasi, industri, akademisi, atau masyarakat publik, memiliki hak untuk dipertimbangkan.

“Sehingga pada forum ini kami dari sisi Pemerintah dan bersama-sama OJK, BI, LPS dan juga dihadiri oleh Badan Keahlian DPR akan lebih mende-

## Perekonomian Indonesia Tumbuh 5,72 Persen

JAKARTA (IM) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh tinggi pada triwulan III-2022, yakni 5,72 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) atau lebih tinggi dari triwulan II-2022 yang sebesar 5,45 persen (yoy).

“Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan III-2022 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tercatat Rp5.091,2 triliun, sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) senilai Rp2.976,8 triliun,” kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2022 secara daring di Jakarta, Senin (7/11).

Pertumbuhan ekonomi secara tahunan tersebut terjadi karena pada triwulan III-2021 nilai PDB ADHB Indonesia hanya sebesar Rp4.325,2 triliun dan PDB ADHK sebesar Rp2.815,9 triliun.

Margo mengatakan tren pertumbuhan ekonomi secara tahunan meningkat secara konsisten selama empat kuartal berturut-turut, dengan tumbuh di atas 5 persen sejak triwulan IV-2021.

“Perkembangan ini menandakan pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan semakin menguat. Ini capaian dan prestasi dari seluruh masyarakat Indonesia di tengah terpaan kondisi global yang semakin tidak menentu, namun kita masih bisa menjaga pertum-

buhan ekonomi kita dan bahkan trennya semakin menguat,” ujarnya.

Disampaikan Margo, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (quarter-to-quarter/qtt), ekonomi domestik mampu tumbuh 1,81 persen dari triwulan II-2022 yang mencatat PDB ADHB senilai Rp4.920,4 triliun dan PDB ADHK Rp2.924 triliun.

Kendati demikian, pertumbuhan kuartalan tersebut tercatat melambat dibandingkan dengan triwulan II-2022 yang sebesar 3,72 persen (qtt), lantaran adanya pola musiman.

Secara kumulatif (cumulative-to-cumulative/ctc) pertumbuhan ekonomi domestik dari triwulan pertama hingga triwulan ketiga tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu mencapai 5,4 persen.

BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan III-2022 yang sebesar 5,72 persen mampu menyerap 4,25 juta tenaga kerja. “Ini berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilakukan pada Agustus 2022,” kata Margo.

Dengan demikian secara keseluruhan terdapat 135,3 juta orang masyarakat yang bekerja per Agustus 2022, yang meliputi pekerja penuh 92,63 juta orang atau meningkat 8,37 juta orang, pekerja paruh waktu 34,13 juta orang atau turun 1,24 juta orang, serta setengah pengangguran 8,54 juta orang atau turun 2,88 juta orang. • dot

## Kuartal 3 di Tahun 2022, Pendapatan Menteng Heritage Realty Tumbuh 40,5 Persen



Perseroan pada Q3 2022 mencatat rugi bersih sebesar Rp 18,3 miliar, membaik dari Q3 2021 rugi bersih sebesar Rp 21,4 miliar.

PT. Menteng Heritage Realty Tbk. (HRME) menargetkan pendapatan sebesar Rp87 miliar hingga akhir tahun ini.

Pertumbuhan pendapatan yang baik sampai Q3 dikarenakan tahun 2022 ini pandemi Covid-19 semakin terkendali, strategi pemasaran hotel The Hermitage yang tepat, serta prospek dari bisnis pelayaran yang masih baik. Perseroan masih berusaha untuk mengembangkan bisnis pelayaran dengan menambah sampai dengan tiga set kapal tug and barge.

The Hermitage, hotel yang dikelola oleh Marriott International ini menawarkan banyak program di Q4 2022 termasuk acara Natal dan Tahun Baru. Antara lain, berkolaborasi dengan BIN-House untuk Hampers Exclusive Natal dan Tahun Baru, serta mengadakan fashion trunk show dalam rangka pembukaan Lee Anne Bakes, cake shop outlet di The Hermitage.

Setelah sukses memperkenalkan 1928 Sunday Brunch, hotel meluncurkan NIGHT BRUNCH pada tiap Jumat Malam yang merupakan pertama di Jakarta. • kris

## Modernland Realty Segera Luncurkan Modern Waterfront Residence di Kota Modern



Modern Waterfront di Kota Modern.

TANGERANG (IM) - Permintaan akan hunian di Kota Tangerang, khususnya proyek perumahan skala kota (*township*) Kota Modern, terus meningkat, seiring semakin lengkapnya fasilitas dan semakin strategisnya kawasan. Untuk memenuhi permintaan tersebut, PT Modernland Realty Tbk. segera meluncurkan hunian terbaru di Kota Modern, yakni *cluster* Modern Waterfront Residence.

“Kami tidak hanya membuat rumah, namun menciptakan rumah sempurna yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat urban modern,” ujar Marketing & Sales Director Urban Development PT Modernland Realty Tbk. Kelvin O Lesmana, dalam

siaran pers tertulis, Senin (7/10).

Dia menambahkan, sebelum melakukan peluncuran perdana (*launching*) yang rencananya akan dilakukan pada akhir tahun 2022, Modernland Realty akan menggelar acara *product knowledge* dengan melibatkan agen properti atau broker properti yang akan membantu pemasaran proyek ini pada 11 November 2022 mendatang.

*Cluster* Modern Waterfront Residence yang dibangun di atas lahan seluas 1,6 ha berada tepat di jantung perumahan Kota Modern.

“Modern Waterfront Residence adalah tempat yang sempurna untuk tinggal di jantung Kota Tangerang dan menyediakan dua tipe rumah

seharga mulai Rp1,6 miliaran,” kata Kelvin O Lesmana.

Andi Lala, *GM Sales & Marketing Urban Development* PT Modernland Realty Tbk. mengungkapkan pihaknya optimistis Modern Waterfront Residence di Kota Modern akan disambut baik oleh pasar.

“Selain memiliki banyak keunggulan yang bisa menarik masyarakat untuk memilikinya, kebutuhan akan rumah di Indonesia sangat tinggi dan pasar *landed house* di Kota Modern juga sangat terbuka karena banyak yang ingin tinggal di Kota Modern yang memiliki banyak kelebihan. Selain itu dari segi investasi, properti masih jadi aset yang baik ditengah kondisi ekonomi saat ini,” pungkasnya. • kris

## Waskita Peroleh Proyek Rp2,55 Triliun di IKN

JAKARTA (IM) - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mendapat kontrak di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, senilai Rp2,55 triliun

Adapun proyek yang akan dibangun adalah gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung pada kawasan Istana Kepresidenan Ibu Kota Negara dengan total nilai kontrak mencapai Rp1,35 triliun.

Dengan dimenangkannya tender proyek gedung Sekre-

tariat Presiden dan bangunan pendukung pada kawasan Istana Kepresidenan ini, maka Waskita telah memenangkan tender proyek IKN dengan nilai kontrak mencapai Rp2,55 triliun.

Waskita juga telah memenangkan dua tender proyek yaitu Proyek Jalan Tol IKN segmen Simpang Tepadung – Jembatan Pulau Balang senilai Rp990 miliar dan pembangunan Jalan Kerja atau Logistik IKN (KIPP) Pa-

ket Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 senilai Rp182 miliar.

SVP Corporate Secretary Waskita Karya, Novianto Ari Nugroho menjelaskan, perseroan bangga atas perolehan proyek pembangunan Gedung Sekretariat Presiden di IKN ini.

“Perseroan akan mengerahkan seluruh sumber daya terbaik yang dimiliki agar dapat menyelesaikan proyek ini dengan baik. Dari pengalaman yang perseroan miliki,

kami yakin dapat mengerjakan proyek ini dengan tepat mutu dan tepat waktu sesuai yang tertuang dalam kontrak,” kata Novi, Senin (7/11).

Novianto mencatat dalam pelaksanaannya nanti, emiten konstruksi pelat merah tidak hanya mengejar target pendapatan, tetapi juga tetap menjaga kepercayaan yang telah diberikan pemerintah dan para pengguna jasa dengan memperhatikan dan mengutamakan aspek keselamatan dan

lingkungan.

Proyek ini rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 50,678 m2 dan luas bangunan 33,312 m2 yang terbagi menjadi tiga bangunan yaitu, Sekretariat Presiden, Mess Paspampres dan Bangunan pendukung.

Pembangunan ini membutuhkan waktu pembangunan selama 720 hari kalender dengan target penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun 2024. • dro

## Pembiayaan Alternatif Jadi Pilihan di Tengah Gejolak Global

JAKARTA (IM) - Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Brahmantio Isidijoso mengatakan, skema pembiayaan alternatif, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) menjadi pilihan di tengah ketidakpastian perekonomian global, untuk mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

“Menjadi sesuatu yang memungkinkan untuk kita menjaga momentum pembangunan infrastruktur secara terus menerus, jika kita menggunakan skema pembiayaan alternatif seperti halnya KPBU,” kata Brahmantio dalam acara “Sharing Session terkait Penerapan Skema Pembiayaan KPBU dalam Proyek Infrastruktur Alat Penerangan Jalan” di Jakarta, Senin (7/11).

Seperti dilansir Antara, dalam pembangunan infrastruktur, dia meminta pemerintah daerah (pemda), baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota untuk tidak bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Alasannya, saat ini APBN sedang memikul beban berat di tengah ketidakpastian perekonomian global, akibat pandemi Covid-19, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, serta pengetatan kebijakan moneter.

Selain itu, karena APBN semakin berat karena fenomena kenaikan angka inflasi di banyak negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang.

“Kita menghadapi gejolak internasional inflasi yang merambah ke kita. Itu membutuhkan upaya bersama-sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berupaya tidak terlalu membuat pemburukan sosial dan ekonomi masyarakat,” kata Brahmantio.

Ia juga mengapresiasi upaya Bupati Madiun, Jawa Timur, Ahmad Dawami atas inisiatifnya yang menerapkan KPBU dalam Proyek Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun, yang merupakan pembiayaan alternatif pertama proyek APJ yang oleh pemda di Indonesia.

“Kami percaya dengan contoh di Madiun, ini akan banyak daerah lain yang mengikuti langkah Madiun. Contoh sudah ada, sudah ada tempat untuk bertanya dan berdiskusi,” kata Brahmantio.

Ke depan, dia berharap berbagai daerah di Indonesia mulai menerapkan skema pembiayaan alternatif melalui KPBU untuk pembangunan infrastruktur, sehingga dapat mengurangi beban terhadap APBN maupun APBD. “Yang lebih baik akan membuat kontribusi pengurangan emisi karbon lebih cepat,” kata Brahmantio. • pan